

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan selain sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bertindak sebagai penyelenggara dan koordinator seluruh usaha Bidang Keuangan dan Daerah Kabupaten Katingan.

Dalam kaitan pelaksanaan Kinerja OPD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan melaksanakan program/kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan. Sedangkan dalam kaitan Kinerja OPD, pelaksanaan kegiatan kerjanya melekat pada tugas dan fungsi Kepala Dinas.

Sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Katingan untuk memberikan *PELAYANAN YANG BAIK AGAR TERWUJUD KATINGAN “BERMARTABAT” UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA “BERMARTABAT” (BERBUDAYA, MAJU, RELIGIUS, TERINTEGRASI, BERKESINAMBUNGAN AMAN DAN TERBUKA)* maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pernyataan sikap dan bentuk pertanggungjawaban dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada sehubungan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berfungsi sebagai kerangka acuan untuk penyusunan rencana anggaran pembiayaan penyelenggaraan pembangunan dan pemberian pelayanan publik yang dijabarkan melalui penyusunan program/kegiatan oleh setiap OPD yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan.

Proses dan tahapan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

- 1) Persiapan Penyusunan
- 2) Penyusunan Rancangan Awal
- 3) Penyusunan Rancangan
- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- 5) Perumusan Rancangan Akhir
- 6) Penetapan Renstra PD

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tahun 2018 - 2023

ini, merupakan implementasi dari salah satu Misi Pemerintah Kabupaten Katingan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan pendapatan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Sebagai tahapan realistis untuk memberikan arah kinerja lima tahun ke depan, dilakukan penyusunan kegiatan berdasarkan program kerja pembangunan yang telah ditetapkan untuk dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018 - 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan disusun berlandaskan pada :

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
- c. Landasan Operasional : Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan rencana strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan yaitu :
 - 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- 10) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;

- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Katingan;
- 20) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014 - 2018 Kabupaten Katingan;
- 21) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN



A. MAKSUD

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan merupakan “guideline” dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Katingan dari tahun 2018 - 2023.

B. TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan mempunyai tujuan :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
- c. Tersusunnya berbagai Kebijakan dan Program Kabupaten Katingan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan;
- d. Penyusunan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

1.4. SISTIMATIKA

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan Latar Belakang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab II diuraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.



BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab III diuraikan Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra Bupati dan Wakil Bupati Terpilih serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BABIV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab IV ini diuraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan serta Indikator Kinerja.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab V ini diuraikan rumusan dan strategi kebijakan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab VI ini diuraikan Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang ingin dicapai.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab VII ini diuraikan Indikator Kinerja yang ingin dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

Pada Bab VIII ini diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN

A. TUGAS

Tugas Pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan kewenangan bidang fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.

B. FUNGSI

1. Penyusunan kebijakan teknis Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.

C. KEWENANGAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan di Bidang Administrasi Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
2. Pendapatan dan Investasi Daerah
 - Pajak dan Retribusi Daerah
 - a. Penetapan kebijakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
 - c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Retribusi Desa
 - d. Pembinaan dan pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah skala Kabupaten
 - e. Evaluasi Raperdes tentang Retribusi dan pungutan lainnya
 - Investasi dan Aset Daerah
 - a. Penetapan kebijakan Pengelolaan Investasi dan Aset Daerah Kabupaten

- b. Pelaksanaan Pengelolaan Investasi dan Aset Daerah Kabupaten
 - c. Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Aset Daerah Kabupaten
 - d. Fasilitasi Pengelolaan Aset Daerah skala Kabupaten
- Pinjaman Daerah
 - a. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi Daerah, serta BLU Kabupaten
 - b. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi Daerah, serta BLU Kabupaten
 - c. Pengawasan pinjaman dan obligasi Daerah, serta BLU Kabupaten
- 3. Dana Tranfer ke Daerah
 - Dana Alokasi Umum (DAU)
 - a. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU Kabupaten
 - b. Pengelolaan DAU Kabupaten/Kota
 - c. Pelaporan pengelolaan DAU Kabupaten
 - Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - a. Usulan program dan kegiatan Kabupaten untuk didanai dari DAK
 - b. Pengelolaan DAK (bagi Kabupaten yang menerima DAK)
 - c. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK
 - Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a. Penyiapan data realisasi penerima DBH Kabupaten
 - b. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH
- 4. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - a. Penetapan kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dan Desa
 - b. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten dan APB Desa
 - c. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
 - d. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent)
 - e. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan dan pelaksanaan APB Desa.

D. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan terdiri dari :

1. Kepala Badan



2. Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan IT
3. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi
 - a) Sub Bidang Pendataan Pajak dan Retribusi
 - b) Sub Bidang Pendaftaran Pajak dan Retribusi
 - c) Sub Bidang Penetapan Pajak dan Retribusi
4. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - a) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi
 - b) Sub Bidang Pembukuan Penerimaan PBB dan BPHTB
 - c) Sub Bidang Pembukuan Penerimaan Daerah Selain PBB P2 dan BPHTB
5. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan
 - a) Sub Bidang Penagihan
 - b) Sub Bidang Keberatan
 - c) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pajak, Retribusi dan PAD Lainnya
6. Kepala Bidang Perbendaharaan
 - a) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
 - b) Sub Bidang Belanja Langsung
 - c) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
7. Kepala Bidang Akuntansi
 - a) Sub Bidang Akuntansi Daerah
 - b) Sub Bidang Akuntansi SKPD
 - c) Sub Bidang Akuntansi Pelaporan dan Tindak lanjut

8. Kepala Bidang Pengelolaan Aset
 - a) Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset
 - b) Sub Bidang Penatausahaan Aset
 - c) Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset
9. Kepala UPTB (Unit Pelayanan Teknis Badan)

Untuk memudahkan pelayanan, koordinasi, dan kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dibantu 3 UPTB yaitu :

1. UPTB Pegatan meliputi Kecamatan Katingan Kuala, Kecamatan Mendawai dan berkedudukan di Pegatan.
2. UPTB Hampalit meliputi Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Kecamatan Pulau Malan berkedudukan di Kereng Panggi;

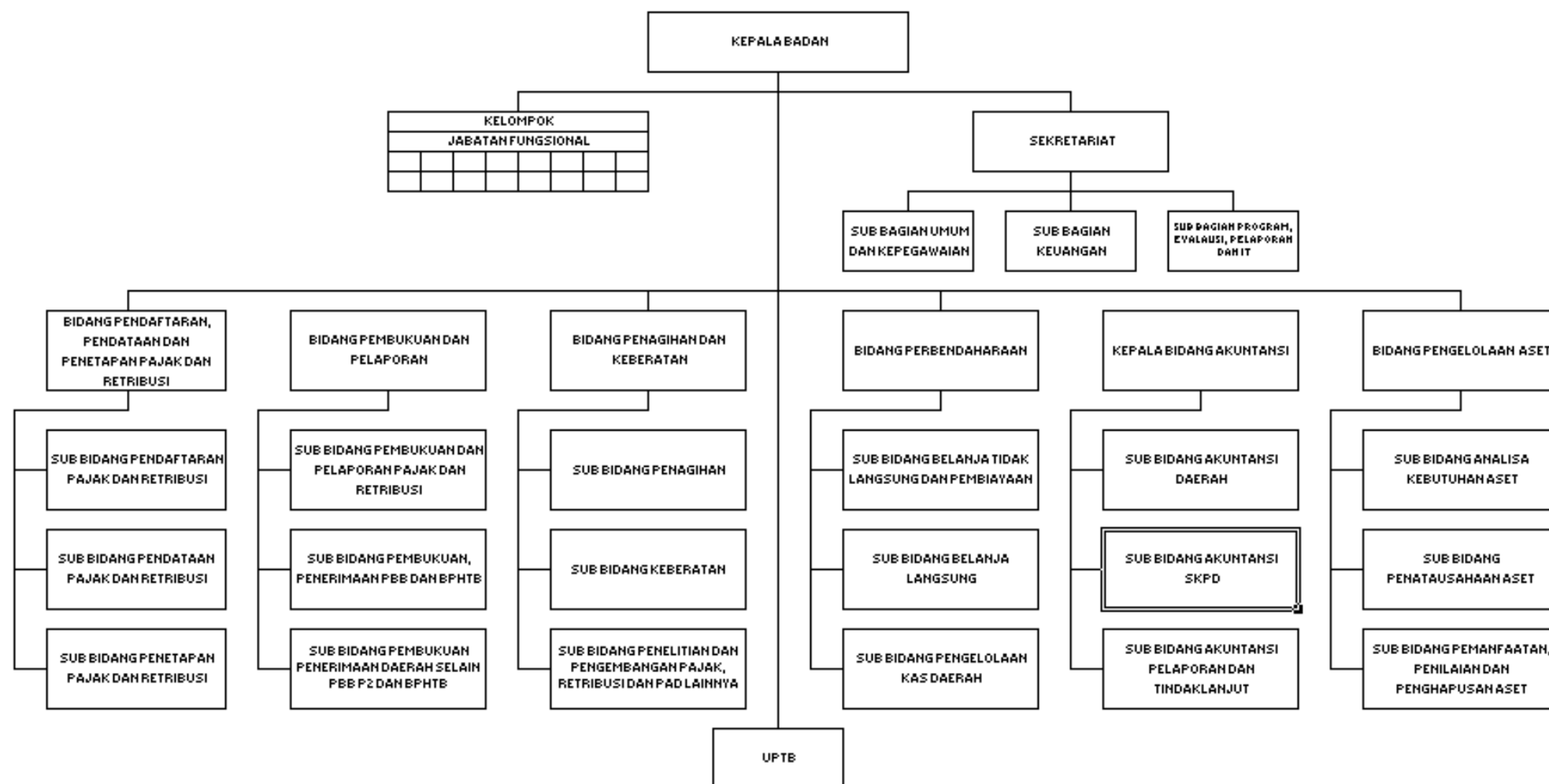


3. UPTB Tumbang Samba meliputi Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Marikit, Kecamatan Katingan Hulu dan Kecamatan Bukit Raya berkedudukan di Tumbang Samba.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan Struktur Organisasi dibawah ini :



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,

H. AHMAD YANTENGLIE

2.2. SUMBER DAYA YANG DIMILIKI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan saat ini berjumlah 62 (enam puluh dua) orang, terdiri dari Pejabat eselon 2b berjumlah 1 (satu) orang, pejabat eselon 3a berjumlah 1 orang Sekretaris Badan, Pejabat Eselon 3b jumlah 5 (lima) orang, terdiri dari Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi, Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Akuntansi serta Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

Sedangkan pejabat eselon 4 berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 18 (delapan belas) orang Kepala Sub Bidang. Untuk Jabatan Kepala UPTB hanya Kepala UPTB Tumbang Samba yang sudah diangkat secara Definitif, sedangkan Kepala UPTB Hampalit dan UPTB Katingan Kuala masih belum ada yang diangkat secara definitif.

Untuk mengetahui lebih jelasnya berkaitan dengan kuantitas sumber daya manusia aparatur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

No	Nama Jabatan	Esselon	Jumlah	Ket
1	Kepala Dinas	Esselon II.b	1	
2	Sekretaris	Esselon III.a	1	
3	Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi	Esselon III.b	1	
4	Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Esselon III.b	1	
5	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan	Esselon III.b	1	
6	Kepala Bidang Perbendaharaan	Esselon III.b	-	
7	Kepala Bidang Akuntansi	Esselon III.b	1	
8	Kepala Bidang Pengelolaan Aset	Esselon III.b	1	
9	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Esselon IV.a	1	
10	Kasubbag Keuangan	Esselon IV.a	1	
11	Kasubbag Program, Evaluasi, Pelaporan dan IT	Esselon IV.a	1	

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah	Ket
12	Kasubbid Pendataan Pajak dan Retribusi	Eselon IV.a	1	
13	Kasubbid Pendaftaran Pajak dan Retribusi	Eselon IV.a	1	
14	Kasubbid Penetapan Pajak dan Retribusi	Eselon IV.a	1	
15	Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi	Eselon IV.a	1	
16	Kasubbid Pembukuan Penerimaan PBB dan BPHTB	Eselon IV.a	1	
17	Kasubbid Pembukuan Penerimaan Daerah Selain PBB P2 dan BPHTB	Eselon IV.a	1	
18	Kasubbid Penagihan	Eselon IV.a	1	
19	Kasubbid Keberatan	Eselon IV.a	1	
20	Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Pajak, Retribusi dan PAD Lainnya	Eselon IV.a	1	
21	Kasubbid Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	Eselon IV.a	1	
20	Kasubbid Belanja Langsung	Eselon IV.a	1	
21	Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah	Eselon IV.a	1	
22	Kasubbid Akuntansi Daerah	Eselon IV.a	1	
23	Kasubbid Akuntansi SKPD	Eselon IV.a	1	
24	Kasubbid Akuntansi Pelaporan dan Tindak lanjut	Eselon IV.a	1	
25	Kasubbid Analisa Kebutuhan Aset	Eselon IV.a	1	
26	Kasubbid Penatausahaan Aset	Eselon IV.a	-	
27	Kasubbid Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset	Eselon IV.a	1	
28	PPKD	Non Esselon	1	
29	Bendahara Pengeluaran OPD	Non Esselon	1	
30	Bendahara Penerimaan OPD	Non Esselon	1	
31	Pengurus Barang	Non Esselon	1	
32	Penyimpan Barang	Non Esselon	1	
33	Pelaksana	Non Esselon	28	
		Non PNS	54	
	TOTAL (PNS + NON PNS)		112	

Sedangkan berdasarkan pendidikan formal yang dimiliki Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dapat diketahui sebagaimana dituangkan dalam tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Kekuatan Personil yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Jabatan	Jumlah						Ket
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
PNS		6	32	8	12			
1	Kepala Badan	1						
2	Sekretaris	1						
3	Kepala Bidang	1	3					
4	Kepala Subbag/Subbid	3	15		2			
5	Staf Pelaksana		14	8	10			
Non PNS			21	1	32			
6	Staf Pelaksana		21	1	32			
TOTAL		6	53	9	42			

B. SARANA DAN PRASARANA

Aset / modal berupa barang inventaris yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sebagai penunjang kegiatan kerja berupa prasarana dan sarana, terdiri dari :

1. Sarana

Sedangkan sarana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan meliputi sarana transportasi, sarana kerja yang bersifat primer maupun yang sekunder (ditunjukkan pada Lampiran).

2. Prasarana

Prasarana yang dimiliki oleh OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan meliputi 4 (empat) unit bangunan gedung kantor, yaitu 1 (satu) unit bangunan gedung kantor, 1 (satu) unit lainnya adalah aula,1 (satu) unit lainnya adalah gudang arsip, dan 1 (satu) unit Musholla.

Pemanfaatan gedung bangunan tersebut antara lain untuk gedung I difungsikan untuk kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sebagai ruang kerja Kepala Badan, ruang rapat, ruang kerja Sekretaris dan Sekretariat, ruang kerja Kepala - Kepala Bidang. Selanjutnya untuk gedung II difungsikan untuk gedung pertemuan/aula. Sedangkan gedung III difungsikan untuk Musholla dan Gudang Arsip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

2.3. KINERJA PELAYANAN

A. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan pada tahun 2014 - 2018 yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel TC-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2014 – 2018

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Pencapaian terhadap target kinerja	-	-	-	80	85	90	-	-	103.85	99.85	99.75	-	-	126.02	108.44	69.01	103.45	-
2	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	-	-	-	80	85	90	-	-	100	100	100	-	-					
3	Persentase Peningkatan Pelayanan Prima	-	-	-	75	80	85	-	-	100	100	100	-	-					
4	Persentasi Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	-	-	75	80	85	-	-	100	100	100	-	-					
5	Persentase Pelaporan secara benar dan tepat waktu	-	-	-	75	80	85	-	-	113.95	94.10	0	-	-					
6	Meningkatnya Ketaatan Pembayaran Wajib Pajak & Wajib Retribusi	-	-	-	75	80	85	-	-	113.95	94.10	0	-	-					
7	Pembinaan / Penyuluhan Pajak dan Retribusi Pajak Daerah	-	-	-	150	200	300	-	-	100	100	137.32	-	-					
8	Pekan Panutan PBB	-	-	-	2	2	2	-	-	0	100	0	-	-					



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Sosialisasi PPh Pasal 21,25, 29 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri	-	-	-	27	27	0	-	-	100	0	0	-	-					
10	Pemutakhiran Data & Pengembangan Data Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	2	2	3	-	-	2	2	3	-	-					
11	Optimalisasi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah Jatuh Tempo	-	-	-	95	95	95	-	-	93.75	94.85	94.85	-	-					
12	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	100	-					
13	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	100	-					
14	Prosentase rata-rata aparatur pemerintah disiplin hadir dan menggunakan atribut lengkap	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-					
15	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	100	-					
16	Cakupan Layanan Perbendaharaan dan Kasda	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	100	-					



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	Cakupan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	100	-					
18	Program Penatausahaan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	100	-					
19	Program Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	100	-					
20	Prosentase Laporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tersusun	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	100	-					
21	Jumlah Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	100	-					
22	Opini BPK terhadap LKPJ Kab. Katingan																		

Tabel TC-24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Katingan Tahun 2014 – 2018

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	3,399,837,600.00	4,855,687,307.01	4,872,735,150.00	4,214,904,000.00		3,245,359,125.00	4,448,727,639.00	4,635,209,565.00	3,225,882,042.00		95.46	91.62	95.13	76.54		4,335,791,014.25	89.68
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,882,900,000.00	692,341,325.00	579,088,000.00	824,300,000.00		1,881,127,275.00	685,095,000.00	574,471,500.00	297,900,000.00		99.91	98.95	99.20	36.14		994,657,331.25	83.55
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	28,000,000.00	40,000,000.00	75,000,000.00	-		27,720,000.00	39,776,000.00	74,700,000.00	-		99.00	99.44	99.60	-		47,666,666.67	99.35
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	126,000,000.00	150,000,000.00	76,000,000.00	17,350,000.00		115,600,000.00	133,950,000.00	75,650,000.00	17,350,000.00		91.75	89.30	99.54	100.00		92,337,500.00	95.15
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	371,620,000.00	339,438,000.00	348,960,400.00			328,065,500.0	283,222,000.00	296,838,000.00			88.28	83.44	85.06	-		353,339,466.67	85.59
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	373,218,000.00	326,965,000.00	271,476,750.00			336,778,000.00	279,258,000.00	247,761,000.00			90.24	85.41	91.26	-		323,886,583.33	88.97
Program Peningkatan Sadar Pajak	150,774,000.00	183,750,000.00	344,279,100.00			150,125,000.00	178,835,000.00	315,229,200.00			99.57	97.33	91.56	-		226,267,700.00	96.15
Program Peningkatan Data Objek Pajak	782,584,000.00	864,284,000.00	690,962,500.00			739,478,000.00	841,364,000.00	627,186,000.00			94.49	97.35	90.77	-		779,276,833.33	94.20
Program Peningkatan Penerimaan Pajak	136,406,000.00	105,036,000.00	54,936,000.00			126,165,000.00	69,878,000.00	51,910,000.00			92.49	66.53	94.49	-		98,792,666.67	84.50
Program Perbendaharaan dan Kasda Perkantoran				698,840,000.00					436,278,250.00		-	-	-	62.43		698,840,000.00	62.43
Program Penatausahaan Keuangan Daerah				542,721,600.00					412,409,700.00		-	-	-	75.99		542,721,600.00	75.99
Program Penatausahaan Aset Daerah				829,450,000.00					649,643,000.00		-	-	-	78.32		829,450,000.00	78.32
Program Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah				303,634,000.00					299,695,000.00		-	-	-	98.70		303,634,000.00	98.70
Program Pembukuan dan Pelaporan				297,438,000.00					131,388,000.00		-	-	-	44.17		297,438,000.00	44.17
Program Penagihan dan Keberatan				94,500,000.00					93,093,000.00		-	-	-	98.51		94,500,000.00	98.51

Tabel Target dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN ASLI DAERAH	35,927,562,535.41	50,988,588,641.89	51,592,006,022.44	49,581,155,694.49		50,959,197,565.90	39,102,838,216.86	46,280,722,191.85	51,313,064,918.75		141.84	76.69	89.71	103.49		47,022,328,223.56	102.93
Pajak Daerah	9,038,693,687.41	12,601,432,619.72	12,159,618,144.00	8,723,696,737.05		17,559,351,060.00	10,250,508,758.00	11,754,994,414.00	24,009,167,589.00		194.27	81.34	96.67	275.22		10,630,860,297.05	161.88
Retribusi Daerah	4,751,077,500.00	4,255,458,000.00	5,502,952,814.74	3,936,891,334.74		5,349,917,003.00	2,306,260,956.00	3,228,625,060.00	3,039,668,360.00		112.60	54.20	58.67	77.21		4,611,594,912.37	75.67
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,963,093,030.15	3,619,254,974.51	4,143,123,625.00	5,393,123,625.00		2,963,093,030.15	3,619,254,974.51	4,143,123,625.20	5,749,484,182.00		100.00	100.00	100.00	106.61		4,029,648,813.67	101.65
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19,174,698,317.85	30,512,443,047.66	29,786,311,438.70	31,527,443,997.70		25,086,836,472.75	22,926,813,528.35	27,153,979,092.65	18,514,744,787.75		130.83	75.14	91.16	58.73		27,750,224,200.48	88.97
DANA PERIMBANGAN	812,673,519,191.00	889,920,026,362.00	902,751,290,456.00	957,685,781,354.00		793,804,635,391.00	852,822,612,439.00	918,845,149,320.00	920,151,106,522.00		97.68	95.83	101.78	96.08		890,757,654,340.75	97.84
Bagi Hasil Pajak	22,609,971,597.00	31,185,822,000.00	22,542,807,000.00	19,888,667,838.00		27,695,667,849.00	25,345,888,505.00	22,570,022,795.00	12,181,493,949.00		122.49	81.27	100.12	61.25		24,056,817,108.75	91.28
Bagi Hasil Bukan Pajak	92,795,965,594.00	120,614,876,362.00	93,021,837,000.00	65,989,921,516.00		68,834,162,697.00	89,355,475,934.00	68,107,861,821.00	53,410,046,890.00		74.18	74.08	73.22	80.94		93,105,650,118.00	75.60
Dana Alokasi Umum (DAU)	645,888,942,000.00	668,100,108,000.00	631,753,354,256.00	696,300,554,000.00		645,888,942,000.00	668,100,108,000.00	708,751,031,000.00	696,300,554,000.00		100.00	100.00	112.19	100.00		660,510,739,564.00	103.05
Dana Alokasi Khusus (DAK)	51,378,640,000.00	70,019,220,000.00	155,433,292,200.00	175,506,638,000.00		51,378,640,000.00	70,021,140,000.00	119,416,233,704.00	158,259,011,683.00		100.00	100.00	76.83	90.17		113,084,447,550.00	91.75
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	-	-	-	-		7,222,845.00	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00			
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	68,309,789,087.96	158,275,268,769.76	138,332,554,000.00	190,055,912,000.00		68,002,640,091.96	135,647,641,999.47	125,940,965,398.08	161,215,466,049.46		99.55	85.70	91.04	84.83		138,743,380,964.43	90.28
Pendapatan Hibah	1,450,000,000.00	2,180,000,000.00	2,086,450,000.00	27,802,700,000.00		1,946,786,070.00	1,886,934,059.00	1,743,887,175.00	662,927,520.00		134.26	86.56	83.58	2.38		8,379,787,500.00	76.70
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26,569,028,087.96	44,704,050,769.76	35,520,000,000.00	35,520,000,000.00		25,765,093,021.96	21,826,141,940.47	23,470,974,223.08	31,319,597,329.46		96.97	48.82	66.08	88.17		35,578,269,714.43	75.01
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32,970,761,000.00	103,091,218,000.00	100,726,104,000.00	126,733,212,000.00		32,970,761,000.00	104,134,566,000.00	100,726,104,000.00	129,232,941,200.00		100.00	101.01	100.00	101.97		90,880,323,750.00	100.75
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7,320,000,000.00	8,300,000,000.00	-	-		7,320,000,000.00	7,800,000,000.00	-	-		100.00	93.98	0.00	0.00		3,905,000,000.00	48.49

TABEL BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2013 S/D 2017

KETERANGAN	TAHUN				
	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	2	3	4	5	6
Tanah	582.839.770.009,50	583.750.863.009,50	584.145.623.609,50	586.917.445.091,50	578.176.000.091,50
Peralatan & Mesin	176.188.608.634,07	209.941.541.635,07	245.565.192.476,14	288.276.670.817,78	295.920.337.373,32
Gedung dan Bangunan	540.179.742.256,04	618.253.771.078,50	693.437.805.247,44	789.621.319.674,06	772.462.547.936,87
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.269.947.318.382,60	1.477.683.983.827,60	1.588.055.553.415,30	1.680.164.819.813,30	1.793.474.338.227,81
Aset Tetap Lainnya	16.875.346.009,77	17.889.915.909,77	24.646.439.667,77	32.343.646.212,77	29.575.770.131,46
Konstruksi dalam Pengerjaan	8.791.659.165,00	12.901.659.207,28	115.136.003.472,29	185.924.936.489,67	349.930.156.353,59
TOTAL	2.594.822.444.456,98	2.920.421.734.667,72	3.250.986.617.888,44	3.563.248.838.099,08	3.819.539.150.114,55
Akumulasi Penyusutan	-	-	(1.290.277.086.639,96)	(1.408.664.013.882,57)	(1.518.843.060.411,30)
GRAND TOTAL	2.594.822.444.456,98	2.920.421.734.667,72	1.960.709.531.248,48	2.154.584.824.216,51	2.300.696.089.703,25

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PELAYANAN

Beberapa faktor yang memberi pengaruh kepada **kesuksesan pelayanan** Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten meliputi :

1. Memanfaatkan SDM yang ada (khususnya yang memiliki kompetensi);
2. Penerapan teknologi informasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Adanya Dana Bagi Hasil Perimbangan Keuangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah Kabupaten Katingan;
4. Kebijakan Regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
5. Dukungan dari Bupati/Wakil Bupati Katingan dan DPRD Kabupaten Katingan terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah;
6. Kebijakan Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
7. Terwujudnya akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berdampak pada peningkatan penerimaan perimbangan Keuangan Kabupaten Katingan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan bukan Pajak bagi Kabupaten Katingan;
8. Penerapan teknologi informasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Pendapatan daerah dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

C. FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELUM BERHASILNYA PELAYANAN

Sebagaimana dijelaskan diatas, disamping terdapat faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan, juga terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat berhasilnya pelayanan. Faktor-faktor penghambat dimaksud dapat berasal dari internal SKPD maupun eksternal SKPD.

1. Faktor Internal SKPD

- a. Kurangnya SDM yang memahami secara utuh konsep dan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pertanggungjawaban APBD;
- b. Kurangnya sarana pendukung dalam upaya meningkatkan PAD;
- c. Masih lemahnya koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas yang menyangkut administrasi dan peraturan;
- d. Kurangnya sarana pendukung dalam upaya pengelolaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Belum optimalnya pengamanan sumber-sumber pendapatan daerah, baik secara administratif, hukum maupun fisik;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan Sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- g. Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Faktor Eksternal SKPD



- a. Adanya peningkatan pembiayaan (cost recovery) yang belum diimbangi dengan peningkatan lifting yang memadai dan adanya perubahan asumsi makro yang digunakan;
- b. Adanya kecenderungan penurunan produksi minyak & gas bumi;
- c. Dengan diterapkannya desentralisasi fiskal berdampak pada Peraturan Daerah yang mendorong timbulnya biaya tinggi dan menghambat investasi di daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
- d. Kondisi politik dan keamanan daerah;
- e. Masalah yang timbul dengan diterapkannya sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang dikehendaki;
- f. Regulasi yang ada saat ini belum mampu mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal serta pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Secara historis OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan adalah peleburan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan (Bagian Perbendaharaan dan Kasda, Bagian Akuntansi dan Bagian Aset berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35).

Maksud dilakukannya pemekaran (perubahan nomenklatur) adalah untuk meningkatkan pemberian pelayanan, baik pelayanan internal birokrasi maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Usia Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan yang efektif dilaksanakan mulai 1 Januari 2017, maka informasi yang akan disajikan menyesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing, yakni informasi kinerja yang tersaji untuk tahun 2017 – 2018 adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sesuai sesuai SOTK baru.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap Rencana Strategis Kabupaten Katingan, maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang yang dapat berimplikasi kepada pengembangan pelayanan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

Hasil identifikasi tantangan (Treats) dan peluang (Opportunities) yang diperoleh, berkaitan dengan *jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan alokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan*, dapat dikemukakan sebagai berikut :



A. IDENTIFIKASI TANTANGAN

Hasil identifikasi **tantangan** dari Renstra Kabupaten Katingan yang dapat menjadi kendala di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, yaitu :

1. Regulasi peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap kinerja aparatur dan kinerja organisasi;
2. Semakin meluasnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah;
3. Penyaluran dana perimbangan keuangan dari DBH Pajak dan bukan Pajak oleh Pemerintah Pusat ke Kas Daerah, tidak tepat waktu;
4. Kondisi perekonomian nasional yang kurang sehat (dampak dari krisis multi dimensional) berpengaruh terhadap perhitungan penurunan pembagian perimbangan keuangan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan bukan Pajak terhadap penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Katingan;
5. Timbulnya persaingan dunia usaha swasta yang kurang sehat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga berdampak pada berkurangnya potensi sumber-sumber penerimaan PAD;
6. Kebijakan mutasi pegawai yang tidak memperhatikan kompetensi aparatur dan kepentingan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Terbukanya peluang kolusi yang ditawarkan Wajib Pajak kepada Aparatur pengelola pemungutan pajak dan retribusidaerah.

B. IDENTIFIKASI PELUANG (OPPORTUNITIES)

Sedangkan hasil identifikasi **peluang** (Opportunities) dari Renstra Kabupaten Katingan yang dapat menjadi pengungkit di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, yaitu :

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
2. Adanya dukungan Bupati dan DPRD dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
3. Akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Tengah berdampak pada peningkatan penerimaan Perimbangan Keuangan Kabupaten Katingan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan bukan Pajak bagi Kabupaten Katingan;
4. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Katingan yang semakin membaik, berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha swasta dan bertambahnya potensi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);



5. Adanya perkembangan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. Adanya peningkatan koordinasi yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Katingan;

Setelah menganalisa pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD pada periode perencanaan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Katingan, selain sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bertindak sebagai penyelenggara dan koordinator seluruh usaha bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Katingan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kendala pelayanan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini :



Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum Maksimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Kualitas Data Base Potensi Pajak dan Retribusi Daerah belum sempurna 2. Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah Masih Rendah 3. Sistem Pelaporan yang dipergunakan masih belum sempurna 4. Masih belum maksimalnya upaya pencapaian target dari pajak dan retribusi daerah	1. Data Yang Belum Akurat 2. Kurangnya Pengetahuan dan informasi wajib pajak dan wajib retribusi terhadap kewajibannya 3. Sistem dan prosedur belum dioptimalkan 4. Masih terdapat tunggakan pajak yang belum terselesaikan
2.	Belum Optimalnya sistim pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Belum Optimalnya Pelayanan Penatausahaan dan Sistim Pelaporan Keuangan 2. Belum Optimalnya Pengelolaan Barang milik daerah	1. Belum maksimalnya kelengkapan Dokumen Keuangan Daerah 2. Belum Terelesaikannya Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah 1. Belum Optimalnya Analisis Kebutuhan Barang Daerah 2. Kualitas Data Aset Daerah Rendah



Tabel. 3.2. Hasil Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belum optimalnya SDM Aparatur		Kuantitas SDM aparatur yang belum memadai masih di bawah kebutuhan riil pelaksanaan beban kerja	Kebijakan mutasi (penempatan) pegawai kurang memperhatikan kuantitas dan kualitas (kompetensi) aparatur. Lebih spesifik tentang teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Belum Akuratnya Data Potensi Pendapatan Asli Daerah	Subyek/Obyek pajak daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum digali secara optimal;	
			Belum optimalnya pelaksanaan penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah	Belum optimalnya pembinaan secara administrasi dan teknis bagi petugas pemungut pajak, bendaharawan OPD dan PPK-OPD dalam penyusunan laporan keuangan dan aset daerah	
				Masih banyaknya potensi wajib pajak (WP) yang belum terdaftar serta rendahnya wajib pajak (WP) yang sudah terdaftar	
				Penyaluran Dana Bagi Hasil Perimbangan Keuangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah Kabupaten Katingan, tidak tepat waktu	

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

A. VISI

KATINGAN “BERMARTABAT” UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA “BERMARTABAT” (BERBUDAYA, MAJU, RELIGIUS, TERINTEGRASI, BERKESINAMBUNGAN AMAN DAN TERBUKA)

B. MISI

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supermasi hukum
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing,
3. Memantapkan pembangunan perdesaan
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender
5. Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan
7. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya

C. PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

MISI I : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPERMASI HUKUM

Program Unggulan :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Peningkatan disiplin dan kinerja ASN.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas ASN.
4. Penataan manajemen dan peningkatan dukungan sistem informasi.
5. Peningkatan kapasitas hukum.
6. Peningkatan kualitas produk hukum.
7. Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

MISI II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING

Program Unggulan :

1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM.
2. Pengembangan lembaga ekonomi Pedesaan.
3. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi.
4. Peningkatan iklim usaha yang kondusif/aman bagi koperasi dan UMKM.
5. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

MISI III : MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Program Unggulan :

1. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
2. Peningkatan peran perempuan di Pedesaan.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pemanfaatan potensi Desa.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.

MISI IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER

Program Unggulan :

1. Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pendidikan Sembilan Tahun.
3. Peningkatan Manajemen Pendidikan.
4. Peningkatan dan peranserta masyarakat.
5. Pendidikan Non Formal.
6. Pendidikan Luar Biasa.
7. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
9. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
10. Pelayanan kesehatan penduduk miskin.
11. Upaya kesehatan masyarakat.
12. Perbaikan gizi masyarakat.
13. Pengembangan lingkungan sehat.
14. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya.
15. Peningkatan pelayanan Anak Balita.
16. Peningkatan keselamatan Ibu dan Anak.
17. Obat dan perbekalan kesehatan.
18. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
20. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
21. Pencegahan, penemuan dan penanganan HIV Aids.
22. Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
23. Keluarga Berencana (KB).
24. Kesehatan reproduksi.

25. Penguatan kelembagaan pengarusuteraan gender dan anak.
26. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

MISI V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI

Program Unggulan :

1. Pembangunan jalan dan jembatan.
2. Pemberdayaan jasa konstruksi.
3. Perencanaan tata ruang.
4. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
5. Pengendalian banjir.
6. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
7. Pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
8. Pembangunan infrastruktur Perdesaan.
9. Peningkatan dan pemerataan Sumber Daya Energi.
10. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
11. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
12. Peningkatan pelayan teknologi informasi.
13. Peningkatan manajemen sumber daya yang terintegrasi.
14. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang terintegrasi.

MISI VI : MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN

Program Unggulan :

1. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
4. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan.
6. Pengendalian kebakaran hutan.
7. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
8. Pengembangan pendidikan lingkungan hidup.
9. Pembinaan, pemantuan dan pengawasan limbah B3.
10. Pemanfaatan Sumber Daya Alam.



MISI VII : MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT DAN SOSIAL BUDAYA

Program Unggulan :

1. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.
2. Pengembangan promosi dan informasi kebudayaan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan.
4. Peningkatan pelaku dan kelembagaan kebudayaan.
5. Pengembangan wawasan kebangsaan.
6. Penguatan hubungan kelembagaan masyarakat.
7. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana ibadah.
8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
9. Penanggulangan kemiskinan daerah.
10. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

A. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KEUANGAN

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional 2015 - 2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong” melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

9 Prioritas (Nawa Cita) dalam pemerintahan menuju Indonesia berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan adalah Nawa Cita nomor 7 (tujuh). Upaya yang dapat ditempuh Kementerian Keuangan adalah melalui penguatan kapasitas fiskal negara.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kapasitas fiskal negara yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan utang. Sasaran tersebut dirinci sebagai berikut :

1. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui :
 - a) Penyempurnaan regulasi pengelolaan PNBP;
 - b) Pengembangan dan penyempurnaan sistem PNBP berbasis IT;
 - c) Inventarisasi, intensifikasi dan/ atau ekstensifikasi PNBP;
 - d) Memperkuat monitoring dan evaluasi PNBP;
 - e) Meningkatkan sinergi dan kapasitas *stakeholders* pengelola PNBP;
 - f) Optimalisasi PNBP migas dan nonmigas;
 - g) Optimalisasi PNBP umum dan BLU
2. Peningkatan kualitas belanja melalui :
 - a) Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga;
 - b) Pencanangan program penghematan dengan pengurangan frekuensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pembatasan pembelian kendaraan dari pembangunan gedung baru,

pengurangan aktivitas seremonial, dan pengutamaan konsumsi atau penggunaan produk dalam negeri (*quick wins*);

- c) Merancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarannya dan tepat sasaran;
- d) Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal;
- e) Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- f) Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat *mandatory spending* seperti anggaran pendidikan, penyediaan dana desa, anggaran kesehatan dan lainnya;
- g) Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan energi;
- h) Melakukan sinkronisasi atas pengelolaan defisit anggaran pada batas yang ditentukan.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi difokuskan pada :

1. Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran;
2. Melakukan desain ulang arsitektur fiskal Indonesia;
3. Peningkatan realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perumahan;
4. Pemberian insentif bagi kementerian lembaga dan daerah yang memiliki penyerapan anggaran yang tinggi dalam mendukung prioritas pembangunan dan kebocorannya rendah.

B. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih dalam tahap penyusunan dan belum dipublikasikan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD

Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan masih belum ada menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah (RTRWP).

3.5. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil telaahan pada sub bab diatas maka isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, antara lain :

1. Kualitas SDM aparatur masih belum memadai;
2. Pengelolaan PAD Belum Optimal;
3. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah;



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi ideal yang ingin di capai, dihasilkan atau diwujudkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realitas antara keinginan (das sollen) dan kenyataan (das sein) dalam kurun waktu tertentu.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, dengan karakteristik :

1. Idealistik dalam arti bahwa tujuan adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan sesuatu serta keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih dan lebih berhasil;
2. Jangkauan ke depan dalam arti bahwa tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan;
3. Abstrak dalam arti bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
4. Konsisten dalam arti bahwa tujuan harus dicapai secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Tujuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan penyusunan kebijakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis adalah target - target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yaitu

1. *Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.*
2. *Peningkatan kepatuhan terhadap sistim laporan keuangan pengelolaan penbedaharaan, akuntansi dan aset daerah.*
3. *Peningkatan Pendapatan Daerah dari PAD.*
4. *Peningkatan Kepatuhan terhadap Sistim Laporan dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.*

4.2 SASARAN

Sasaran merupakan target spesifik dari suatu tujuan yang ingin dicapai, dihasilkan dan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran harus bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sehingga dapat diukur, dinilai serta berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu, baik bulanan, triwulan, semester atau tahunan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan difokuskan pada upaya tercapainya perwujudan profesionalisme aparatur yang mendukung perwujudan peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan serta peningkatan mutu pelayanan, yaitu :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja*
- b. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perbendaharaan*
- d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Akuntansi*
- e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Aset*
- f. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah*
- g. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.*

Tabel TC-25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Nilai Lakip	B	B	B	A	A
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC	B	BB
2	Peningkatan kepatuhan terhadap sistim laporan keuangan pengelolaan penbedaharaan, akuntansi dan aset daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perbendaharaan	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Akuntansi						
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Aset	Persentase Penyampaikan Laporan Pengelolaan BMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	100	100	100	100
3	Peningkatan Pendapatan Daerah dari PAD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	6	7	8	9	10
4	Peningkatan Kepatuhan terhadap Sistim Laporan dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72	73	74	75	76

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perencanaan strategis sebagai salah satu unsur manajemen strategis menjadi suatu yang urgen, dikonseptualisasikan dan diaplikasikan dalam proses pembuatan keputusan berdasarkan perkiraan masa depan. Sedangkan strategi adalah cara efektif yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam upaya mencapai tujuan, sasaran dan misi dalam konsistensi Visi organisasi.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan adalah tahap akhir dari perencanaan strategis yang merupakan komitmen organisasi dari pimpinan puncak sampai line terbawah. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dengan melakukan strategi tertentu untuk mencapainya. *Strategi* yang akan ditempuh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



Tabel TC-26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : <i>KATINGAN “BERMARTABAT” UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJATERA “BERMARTABAT” (BERBUDAYA, MAJU, RELIGIUS, TERINTEGRASI, BERKESINAMBUNGAN AMAN DAN TERBUKA)</i>			
MISI I : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supermasi hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja - Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik
Peningkatan kepatuhan terhadap sistim laporan keuangan pengelolaan penbedaharaan, akuntansi dan aset daerah	- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perbendaharaan - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Akuntansi	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penatausahaan dan Sistim Pelaporan Keuangan	- Terpenuhinya Kebutuhan Laporan Keuangan Daerah - Mengoptimalkan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah - Mengoptimalkan Sistim Pengelolaan Keuangan daerah - Mengoptimalkan pelayanan dokumen perbendaharaan daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Aset	- Peningkatan Kualitas Pengelolaan aset daerah secara tertib, transparan dan akuntabel	- Meningkatkan Pengelolaan Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Barang milik daerah
Peningkatan Pendapatan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Peningkatan Kualitas Sistem Pelaporan Pendapatan Daerah	- Membangun Sistim Pelaporan Pendapatan Daerah - Mengoptimalkan penyelesaian tunggakan pajak daerah
		- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data Pajak dan Retribusi Daerah	- Pendataan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
Peningkatan Kepatuhan terhadap Sistim Laporan dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	- Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	- Mengoptimalkan Upaya Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan 2018-2023.

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2019-2023)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Peningkatan kepatuhan terhadap sistim laporan keuangan pengelolaan penbedahaan, akuntansi dan aset daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perbendaharaan	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	4.04.4.04.06.49	Program Perbendaharaan dan Kasda Perkantoran	Prosentase Laporan Keuangan yang sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	691,984,500.00	100%	575,000,000.00	100%	632,500,000.00	100%	695,750,000.00	100%	765,325,000.00	100%	841,857,500.00	100%	3,510,432,500.00	Bidang Perbendaharaan dan Kasda	Kasongan
			4.04.4.04.06.49.01	Penyediaan Data Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perbendaharaan dan Kasda	12 Laporan	39,310,000.00	12 Laporan	35,075,000.00	12 Laporan	38,582,500.00	12 Laporan	42,440,750.00	12 Laporan	46,684,825.00	12 Laporan	51,353,307.50	12 Laporan	214,136,382.50	Bidang Perbendaharaan dan Kasda	Kasongan
			4.04.4.04.06.49.02	Penyusunan Laporan SPD	Jumlah Dokumen Laporan SPD	12 Laporan	100,132,500.00	12 Laporan	87,700,000.00	12 Laporan	96,470,000.00	12 Laporan	106,117,000.00	12 Laporan	116,728,700.00	12 Laporan	128,401,570.00	12 Laporan	535,417,270.00	Bidang Perbendaharaan dan Kasda	Kasongan
			4.04.4.04.06.49.03	Penyusunan Laporan KASDA	Jumlah Dokumen Laporan	12 Laporan	97,426,000.00	12 Laporan	98,655,000.00	12 Laporan	108,520,500.00	12 Laporan	119,372,550.00	12 Laporan	131,309,805.00	12 Laporan	144,440,785.50	12 Laporan	602,298,640.50	Bidang Perbendaharaan dan Kasda	Kasongan
			4.04.4.04.06.49.04	Penyusunan Laporan SP2D	Jumlah Dokumen Laporan SP2D	12 Dokumen laporan	179,316,000.00	12 Laporan	203,570,000.00	12 Laporan	223,927,000.00	12 Laporan	246,319,700.00	12 Laporan	270,951,670.00	12 Laporan	298,046,837.00	12 Laporan	1,242,815,207.00	Bidang Perbendaharaan dan Kasda	Kasongan

			4.04.4.04.06.4.05	Penyusunan Laporan Pemotongan / Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pajak	1 Raperda dan 1 Raperbup/ Raperkada	275,800,000.00	12 Laporan	150,000,000.00	12 Laporan	165,000,000.00	12 Laporan	181,500,000.00	12 Laporan	199,650,000.00	12 Laporan	219,615,000.00	12 Laporan	915,765,000.00	Bidang Perbendaharaan dan Kasda	Kasongan
Peningkatan kepatuhan terhadap sistim laporan keuangan pengelolaan penbedaharaan, akuntansi dan aset daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Akuntansi	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	4.04.4.04.06.80	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Prosentase Laporan Penatausahaan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	549,811,503.25	100%	748,320,000.00	100%	895,752,000.00	100%	985,327,200.00	100%	1,083,859,920.00	100%	1,192,245,912.00	100%	4,905,505,032.00	Bidang Akuntansi	Kasongan
			4.04.4.04.06.80.01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan	1 Raperda dan 1 Raperbup/ Raperkada	94,885,503.25	2 Raperda/Raperbup	111,000,000.00	2 Raperda/Raperbup	161,700,000.00	2 Raperda/Raperbup	177,870,000.00	2 Raperda/Raperbup	195,657,000.00	2 Raperda/Raperbup	215,222,700.00	2 Raperda/Raperbup	861,449,700.00	Bidang Akuntansi	Kasongan
			4.04.4.04.06.80.02	Peningkatan Penatausahaan / Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi	480 Laporan rekonsiliasi	276,400,000.00	12 Dokumen	197,000,000.00	12 Dokumen	216,700,000.00	12 Dokumen	238,370,000.00	12 Dokumen	262,207,000.00	12 Dokumen	288,427,700.00	12 Dokumen	1,202,704,700.00	Bidang Akuntansi	Kasongan
			4.04.4.04.06.80.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kabupaten	Jumlah Laporan Keuangan Daerah (LRA)	12 Laporan Keuangan Daerah	94,350,000.00	3 Laporan	96,100,000.00	3 Laporan	116,710,000.00	3 Laporan	128,381,000.00	3 Laporan	141,219,100.00	3 Laporan	155,341,010.00	3 Laporan	637,751,110.00	Bidang Akuntansi	Kasongan
			4.04.4.04.06.80.04	Penyusunan Laporan Dana Tugas Pembantuan	Jumlah Laporan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Per semester	1 Laporan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Per semester	28,176,000.00	1 Laporan	45,220,000.00	1 Laporan	49,742,000.00	1 Laporan	54,716,200.00	1 Laporan	60,187,820.00	1 Laporan	66,206,602.00	1 Laporan	276,072,622.00	Bidang Akuntansi	Kasongan

			4.04.4.04.06.80.05	Operasional Tim TPTGR Kabupaten Katingan	Terlaksananya Sidang/ Rapat MP TP-TGR dan Sekretariat TP-TGR	12 sidang/ rapat/ Majelis/ Sekretaris TP-TGR	56,000,000.00	12 Kali	159,000,000.00	12 Kali	174,900,000.00	12 Kali	192,390,000.00	12 Kali	211,629,000.00	12 Kali	232,791,900.00	12 Kali	970,710,900.00	Bidang Akuntansi	Kasongan
			4.04.4.04.06.80.06	Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penyelesaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu	17 Dokumen laporan PD per bulan	-	12 Bulan	140,000,000.00	12 Bulan	176,000,000.00	12 Bulan	193,600,000.00	12 Bulan	212,960,000.00	12 Bulan	234,256,000.00	12 Bulan	956,816,000.00	Bidang Akuntansi	Kasongan
Peningkatan kepatuhan terhadap sistem laporan keuangan pengelolaan penbedaharaan, akuntansi dan aset daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Aset	Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan BMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	4.04.4.04.06.81	Program Penatausahaan Aset Daerah	Prosentase Aset yang tercatat dalam Neraca Daerah	100%	273,907,500.00	100%	836,449,600.00	100%	1,009,719,560.00	100%	1,110,779,516.00	100%	1,221,857,467.60	100%	1,344,043,214.36	100%	5,522,849,357.96	Bidang Pengelolaan Aset	Kasongan
			4.04.4.04.06.81.02	Penyusunan standar Satuan Harga	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Daerah	2 Dokumen	18,240,000	2 Buku	60,800,000	2 Buku	88,800,000	2 Buku	97,680,000	2 Buku	107,448,000	2 Buku	118,192,800	2 Buku	472,920,800	Bidang Pengelolaan Aset	Kasongan
			4.04.4.04.06.81.21	Rekonsiliasi aset Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Aset PD	468 Dokumen	88,207,500	12 Laporan	134,672,000	12 Laporan	148,139,200	12 Laporan	162,953,120	12 Laporan	179,248,432	12 Laporan	197,173,275	12 Laporan	822,186,027	Bidang Pengelolaan Aset	Kasongan
			4.04.4.04.06.81.22	Penyusunan Laporan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	5,460,000	2 Laporan	33,677,600	2 Laporan	86,210,360	2 Laporan	94,919,396	2 Laporan	104,411,336	2 Laporan	114,852,469	2 Laporan	434,071,161	Bidang Pengelolaan Aset	Kasongan

			4.04.4.04.06.81.23	Perubahan status Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian dan Lelang Barang Milik Daerah	2 Dokumen	-	2 Dokumen	128,600,000	2 Dokumen	160,000,000	2 Dokumen	176,000,000	2 Dokumen	193,600,000	2 Dokumen	212,960,000	2 Dokumen	871,160,000	Bidang Pengelolaan Aset	Kasongan
			4.04.4.04.06.81.25	Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (KIB Kabupaten)	1 Dokumen	80,000,000	12 Laporan	478,700,000	12 Laporan	526,570,000	12 Laporan	579,227,000	12 Laporan	637,149,700	12 Laporan	700,864,670	12 Laporan	2,922,511,370	Bidang Pengelolaan Aset	Kasongan
			4.04.4.04.06.81.26	Sertifikasi Tanah	Jumlah Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	1 Dokumen	82,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengelolaan Aset	Kasongan
Peningkatan Kepatuhan terhadap Sistim Laporan dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi di Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4.04.4.04.06.82	Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Prosentase Peningkatan Wajib Pajak/Retribusi Daerah	7.5 % Tahunan	644,874,000.00	5000 OP	509,145,000.00										509,145,000.00	Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.82.01	Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak dan wajib retribusi	3500 WP Baru dan 140 WR Baru	279,000,000.00	1500 OP/WP	36,300,000.00										36,300,000.00	Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.82.02	Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak dan wajib retribusi	3500 WP Baru dan 140 WR Baru	298,634,000.00	1500 OP/WP	298,000,000.00										298,000,000.00	Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.82.03	Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	10000 Dokumen	7,000,000.00	1500 OP/WP	13,200,000.00										13,200,000.00	Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Kab. Katingan

			4.04.4.04.06.82.04	Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan penetapan	36 Laporan Ketetapan	60,240,000.00	13 Dokumen	66,000,000.00										66,000,000.00	Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.82.05	Pekan Panutan PBB	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	1 Kali	-	300 WP	95,645,000.00										95,645,000.00	Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Kab. Katingan
Peningkatan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4.04.4.04.06.60	Peningkatan Penerimaan Pajak	Prosentase Peningkatan Wajib Pajak/Retribusi Daerah	7.5 % Tahunan	-	-	-	86%	#####	87%	1,026,000,000.00	88%	#####	89%	#####	89%	4,204,000,000.00	Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.60.01	Pembinaan dan Penyuluhan Subjek PBB dan BPHTB	Prosentase Peningkatan Jumlah Wajib PBB P2 dan BPHTB	-	-	-	-	100 Aparatur/ Desa dan 15 ASN/THL	300,000,000.00	100 Aparatur/ Desa	200,000,000.00	100 Aparatur/ Desa	200,000,000.00	100 Aparatur/ Desa	200,000,000.00		900,000,000.00	Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.60.02	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Prosentase Peningkatan Jumlah Subjek dan Objek Pajak/Retribusi	-	-	-	-	300 WP	60,000,000.00	300 WP	60,000,000.00	300 WP	60,000,000.00	300 WP	60,000,000.00		240,000,000.00	Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.61.03	Pengelolaan Sistem Informasi PBB dan BPHTB	Prosentase Peningkatan Layanan	-	-	-	-	4 Aplikasi	340,000,000.00	4 Aplikasi	340,000,000.00	4 Aplikasi	340,000,000.00	4 Aplikasi	340,000,000.00		1,360,000,000.00	Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.61.06	Pemutakhiran Data dan Pengembangan Data Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah data baru dan penyelesaian data bermasalah	-	-	-	-	4000 Subjek/ Objek dan 2 Dokumen	360,000,000.00	4000 Subjek/ Objek dan 2 Dokumen	360,000,000.00	4000 Subjek/ Objek dan 2 Dokumen	360,000,000.00	4000 Subjek/ Objek dan 2 Dokumen	360,000,000.00		1,440,000,000.00	Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Kab. Katingan

			4.04.4.04.06.62.03	Penilaian dan Penetapan PBB	Jumlah Dokumen dan Tepat Waktu	-	-			52000 Dokumen SPPT dan 161 Dokumen DHKP	66,000,000.00	53000 Dokumen SPPT dan 161 Dokumen DHKP	66,000,000.00	54000 Dokumen SPPT dan 161 Dokumen DHKP	66,000,000.00	55000 Dokumen SPPT dan 161 Dokumen DHKP	66,000,000.00		264,000,000.00	Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Kab. Katingan
Peningkatan Pendapatan Daerah dari PAD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	4.04.4.04.06.83	Program Pembukuan dan Pelaporan	Prosentase Pembukuan dan Laporan Pendapatan Daerah yang sesuai Ketentuan dan tepat waktu	100%	195,168,000.00	100%	262,604,400.00	100%	288,864,840.00	100%	317,751,324.00	100%	349,526,456.40	100%	384,479,102.04	100%	1,603,226,122.44	Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.83.01	Pembukuan Penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Pembukuan dan Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB	12 Dokumen dan Laporan/tahun	30,912,000.00	12 Laporan	36,387,800.00	12 Laporan	40,026,580.00	12 Laporan	44,029,238.00	12 Laporan	48,432,161.80	12 Laporan	53,275,377.98	12 Laporan	222,151,157.78	Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.83.02	Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah	Peningkatan Target PAD	6 % dari Pendapatan Daerah	96,324,000.00	2 Kali	108,077,200.00	2 Kali	118,884,920.00	2 Kali	130,773,412.00	2 Kali	143,850,753.20	2 Kali	158,235,828.52	2 Kali	659,822,113.72	Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.83.03	Pembukuan Penerimaan Pajak, Retribusi selain PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah Dokumen Pembukuan dan Laporan Penerimaan Pajak, Retribusi selain PBB P2 dan BPHTB	12 Dokumen	16,632,000.00	12 Laporan	21,434,400.00	12 Laporan	23,577,840.00	12 Laporan	25,935,624.00	12 Laporan	28,529,186.40	12 Laporan	31,382,105.04	12 Laporan	130,859,155.44	Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.83.04	Pelatihan Pembukuan Bendahara Penerimaan Pembantu			51,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.83.05	Rekonsiliasi Penerimaan PAD dengan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	180 Dokumen Rekonsiliasi	-	12 Kali	56,705,000.00	12 Kali	62,375,500.00	12 Kali	68,613,050.00	12 Kali	75,474,355.00	12 Kali	83,021,790.50	12 Kali	346,189,695.50	Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.83.06	Intensifikasi Pajak	Jumlah pelaksanaan rapat dengan PBS	1 Kali	-	17 PBS	40,000,000.00	17 PBS	44,000,000.00	17 PBS	48,400,000.00	17 PBS	53,240,000.00	17 PBS	58,564,000.00	17 PBS	244,204,000.00	Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Kab. Katingan

Peningkatan Pendapatan Daerah dari PAD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	4.04.4.04.06.8 4	Program Penagihan dan Keberatan	Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6% dari Pendapatan Daerah	294,575,000.00	69%	379,550,000.00	72%	454,505,000.00	75%	519,755,500.00	78%	571,731,050.00	80%	628,904,155.00	80%	2,554,445,705.00	Bidang Penagihan dan Keberatan	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.8 4.01	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Prosentase peningkatan penerimaan pajak/retribusi, dan prosentase penurunan piutang pajak/retribusi, jumlah spanduk dan baliho, jumlah stiker	Pajak daerah = 15.120.363.084, Retribusi Daerah = 4.093.188.166, Persentase penurunan piutang pajak/Retribusi Daerah, 161 buah spanduk dan 19 baliho, 12000 buah	19,500,000.00	53.357 OP	85,000,000.00	53.357 OP	120,000,000.00	53.357 OP	132,000,000.00	53.357 OP	145,200,000.00	53.357 OP	159,720,000.00	53.357 OP	641,920,000.00	Bidang Penagihan dan Keberatan	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.8 4.02	Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah	- Prosentase penyelesaian keberatan - jumlah leaflet	100%	75,075,000.00	1 Dokumen	70,000,000.00	1 Dokumen	85,000,000.00	1 Dokumen	113,300,000.00	1 Dokumen	124,630,000.00	1 Dokumen	137,093,000.00	13 Kecamatan	530,023,000.00	Bidang Penagihan dan Keberatan	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.8 4.03	Penelitian Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 Kecamatan	-	Bidang Penagihan dan Keberatan	Kab. Katingan
				Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen Potensi -	-	13 Kecamatan	150,000,000.00	13 Kecamatan	175,000,000.00	13 Kecamatan	192,500,000.00	13 Kecamatan	211,750,000.00	13 Kecamatan	232,925,000.00	13 Kecamatan	962,175,000.00	Bidang Penagihan dan Keberatan	Kab. Katingan
				Rapat Evaluasi Peraturan / Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah	Tersusunnya dokumen rancangan peraturan/ ketentuan pajak dan retribusi daerah	1 Dokumen Peraturan	-	2 Laporan	74,550,000.00	2 Laporan	74,505,000.00	2 Laporan	81,955,500.00	2 Laporan	90,151,050.00	2 Laporan	99,166,155.00	2 Laporan	420,327,705.00	Bidang Penagihan dan Keberatan	Kab. Katingan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan nilai LAKIP	4.04.4.04.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	5,447,989,000.00	100%	5,770,810,456.96	100%	5,873,828,502.89	100%	7,007,425,152.92	100%	7,708,167,668.21	100%	8,478,984,435.03	100%	34,839,216,216.02	Sekretariat	Kab. Katingan
			4.04.4.04.06.01.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim/Paket Pengiriman	900 Surat	5,000,000.00	20 Paket	5,000,000.00	20 Paket	5,500,000.00	20 Paket	6,050,000.00	20 Paket	6,655,000.00	20 Paket	7,320,500.00	20 Paket	30,525,500.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	662,000,000.00	12 Bulan	542,600,000.00	12 Bulan	542,660,000.00	12 Bulan	596,926,000.00	12 Bulan	656,618,600.00	12 Bulan	722,280,460.00	12 Bulan	3,061,085,060.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	39 Unit	510,000,000.00	39 Unit	561,000,000.00	39 Unit	617,100,000.00	39 Unit	678,810,000.00	39 Unit	746,691,000.00	39 Unit	821,360,100.00	39 Unit	3,424,961,100.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Bulan Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	12 Bulan	194,816,000.00	12 Bulan	208,128,000.00	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	208,128,000.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	19,400,000.00	12 Bulan	21,340,000.00	12 Bulan	23,474,000.00	12 Bulan	25,821,400.00	12 Bulan	28,403,540.00	12 Bulan	31,243,894.00	12 Bulan	130,282,834.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	180 Jenis	84,000,000.00	12 Bulan	84,000,000.00	12 Bulan	133,600,000.00	12 Bulan	146,960,000.00	12 Bulan	161,656,000.00	12 Bulan	177,821,600.00	12 Bulan	704,037,600.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Bulan Alat Tulis Kantor yang Disediakan	1 Tahun	214,270,000.00	12 Bulan	378,100,000.00	12 Bulan	350,000,000.00	12 Bulan	385,000,000.00	12 Bulan	423,500,000.00	12 Bulan	465,850,000.00	12 Bulan	2,002,450,000.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Bulan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	222,525,000.00	12 Bulan	269,564,456.96	12 Bulan	254,520,900.00	12 Bulan	279,972,990.00	12 Bulan	307,970,289.00	12 Bulan	338,767,317.90	12 Bulan	1,450,795,953.86	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi	450 Buah	17,500,000.00	8 Instalasi Gedung	80,000,000.00	8 Instalasi Gedung	88,000,000.00	8 Instalasi Gedung	96,800,000.00	8 Instalasi Gedung	106,480,000.00	8 Instalasi Gedung	117,128,000.00	8 Instalasi Gedung	488,408,000.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62 Buah	182,000,000.00	79 Buah, 10 Unit, 1 Set dan 4 Paket	266,200,000.00	79 Buah, 10 Unit, 1 Set dan 4 Paket	214,500,000.00	79 Buah, 10 Unit, 1 Set dan 4 Paket	235,950,000.00	79 Buah, 10 Unit, 1 Set dan 4 Paket	259,545,000.00	79 Buah, 10 Unit, 1 Set dan 4 Paket	285,499,500.00	79 Buah, 10 Unit, 1 Set dan 4 Paket	1,261,694,500.00	Sekretariat	Kasongan

			4.04.4.04.06.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Buah	10,000,000.00	15 Buah	56,000,000.00	15 Buah	34,100,000.00	15 Buah	37,510,000.00	15 Buah	41,261,000.00	15 Buah	45,387,100.00	15 Buah	214,258,100.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	60,000,000.00	12 Bulan	66,000,000.00	12 Bulan	72,600,000.00	12 Bulan	79,860,000.00	12 Bulan	87,846,000.00	12 Bulan	96,630,600.00	12 Bulan	402,936,600.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	235,090,000.00	12 Bulan	249,500,000.00	12 Bulan	264,450,000.00	12 Bulan	290,895,000.00	12 Bulan	319,984,500.00	12 Bulan	351,982,950.00	12 Bulan	1,476,812,450.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Cakupan Bulan Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	275 Kali	500,000,000.00	12 Bulan	550,000,000.00	12 Bulan	655,161,602.89	12 Bulan	970,677,762.93	12 Bulan	1,067,745,539.22	12 Bulan	1,174,520,093.15	12 Bulan	4,418,104,998.19	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Cakupan Bulan Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	185 Kali	743,100,000.00	12 Bulan	658,550,000.00	12 Bulan	797,100,000.00	12 Bulan	1,173,023,799.99	12 Bulan	1,290,326,179.99	12 Bulan	1,419,358,797.99	12 Bulan	5,338,358,777.97	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.20	Pembinaan Non PNS	Jumlah PHL	55 Orang	1,377,048,000.00	48 Orang	1,380,168,000.00	48 Orang	1,382,148,000.00	48 Orang	1,520,362,800.00	48 Orang	1,672,399,080.00	48 Orang	1,839,638,988.00	48 Orang	7,794,716,868.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.22	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Bulan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	28 Orang	41,940,000.00	12 Bulan	7,320,000.00	12 Bulan	31,320,000.00	12 Bulan	34,452,000.00	12 Bulan	37,897,200.00	12 Bulan	41,686,920.00	12 Bulan	152,676,120.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.29	Penyediaan Dana Operasional UPTB di Tumbang Samba	Cakupan Bulan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Tumbang Samba	12 Bulan	123,100,000.00	12 Bulan	126,980,000.00	12 Bulan	134,398,000.00	12 Bulan	147,837,800.00	12 Bulan	162,621,580.00	12 Bulan	178,883,738.00	12 Bulan	750,721,118.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.30	Penyediaan Dana Operasional UPTB di Hampalit	Cakupan Bulan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Hampalit	12 Bulan	149,500,000.00	12 Bulan	153,380,000.00	12 Bulan	160,798,000.00	12 Bulan	176,877,800.00	12 Bulan	194,565,580.00	12 Bulan	214,022,138.00	12 Bulan	899,643,518.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.4.04.06.01.31	Penyediaan Dana Operasional UPTB di Pegatan	Cakupan Bulan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Pegatan	12 Bulan	96,700,000.00	12 Bulan	106,980,000.00	12 Bulan	112,398,000.00	12 Bulan	123,637,800.00	12 Bulan	136,001,580.00	12 Bulan	149,601,738.00	12 Bulan	628,619,118.00	Sekretariat	Kasongan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan nilai LAKIP	4.04.4.04.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%	2,373,000,000.00	100%	12,726,500,000.00	100%	3,305,955,708.00	100%	579,850,000.00	100%	422,835,000.00	100%	442,618,500.00	100%	17,477,759,208.00	Sekretariat	Kab. Katingan
			4.04.06.02.01	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang	-	-	-	-	0	0.00	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kasongan

					Dibangun																
			4.04.06.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	1,225,000,000.00	2 Unit	2,591,500,000.00	14 Unit	440,000,000.00	1 Unit	-	-	-	-	-	13,031,500,000.00	Sekretariat	Kasongan	
			4.04.06.02.11	Pembangunan Pagar	Jumlah Pagar yang dibangun	-	-	-	-	1 Paket	400,000,000.00	1 Paket	479,850,000.00	-	-	-	-	879,850,000.00	Sekretariat	Kasongan	
			4.04.06.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	9 Unit	275,000,000.00	6 Paket	85,000,000.00	1 Tahun	450,000,000.00	1 Tahun	100,000,000.00	1 Tahun	222,835,000.00	1 Tahun	442,618,500.00	1 Tahun	1,300,453,500.00	Sekretariat	Kasongan
			4.04.06.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Direhab	-	-	-	-	4 Paket	520,000,000.00	-	-	-	-	-	-	520,000,000.00			
			4.04.06.02.47	Pembangunan Pengembangan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dikembangkan	-	-	-	-	1 Paket	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00	Sekretariat	Kasongan	
			4.04.06.02.50	Pengadaan Kontruksi/Pembangunan Tempat Parkir	Jumlah Tempat Parkir Yang Dibangun	1 Paket	200,000,000.00	-	-	1 Paket	220,000,000.00	-	-	-	-	-	-	220,000,000.00	Sekretariat	Kasongan	
			4.04.06.02.72	Pembangunan Drainase Kantor	Jumlah Drainase Kantor yang Dibangun	1 Paket	200,000,000.00	-	-	170 Meter	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000,000.00	Sekretariat	Kasongan	
				Pengadaan Kontruksi Jalan	Luasan Kontruksi yang dibangun	0	-	-	-	1 Paket	300,000,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000,000.00	Sekretariat	Kasongan	
				Pengadaan Peralatan Aula Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Aula Gedung Kantor	-	-	-	-	1 Tahun	600,000,000.00	-	-	-	-	-	-	600,000,000.00			
			4.04.06.03.02	Belanja Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian yang Disediakan	135 Stell	123,000,000.00	-	-	61 Stell	75,955,708.00	-	-	-	-	-	-	75,955,708.00	Seluruh Bidang	Kasongan	
			4.04.06.02.54	Pembangunan Pengembangan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah Dinas Yang Dikembangkan	1 Paket	350,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kasongan	
				Pengembangan Taman Kantor	Jumlah atau Luasan Taman Kantor yang Dikembangkan	-	-	1 Paket	50,000,000.00	-	-	-	1 Paket	200,000,000.00	-	-	-	250,000,000.00	Sekretariat	Kasongan	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Pelaksanaan RB	Indeks Reformasi Birokrasi	4.04.4.04.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Apartur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	80%	75,000,000.00	84%	100,000,000.00	87%	137,500,000.00	91%	151,250,000.00	96%	166,375,000.00	100%	183,012,500.00	100%	738,137,500.00	Seluruh Bidang	Dalam dan Luar Daerah
			4.04.4.04.06.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Berkontribusi yang diikuti	12 Kali	75,000,000.00	25 Kali	100,000,000.00	25 Kali	137,500,000.00	25 Kali	151,250,000.00	25 Kali	166,375,000.00	25 Kali	183,012,500.00	25 Kali	738,137,500.00	Seluruh Bidang	Dalam dan Luar Daerah

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan nilai LAKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyampaian Laporan Tepat Waktu	100%	-	-	-	100%	338,208,000.00	100%	343,273,747.18	100%	345,069,256.92	100%	347,124,089.74	100%	1,373,675,093.84	Sekretariat	Kasongan
			Pembuatan Dokumen Lakip	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	32,520,000.00	1 Dokumen	34,585,747.18	1 Dokumen	36,381,256.92	1 Dokumen	38,436,089.74	1 Dokumen	141,923,093.84	Sekretariat	Kasongan
			Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen RENJA	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	45,528,000.00	1 Dokumen	46,528,000.00	1 Dokumen	46,528,000.00	1 Dokumen	46,528,000.00	1 Dokumen	185,112,000.00	Sekretariat	Kasongan
			Penyusunan Renstra	Jumlah Dokumen RENSTRA	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	32,520,000.00	1 Dokumen	33,520,000.00	1 Dokumen	33,520,000.00	1 Dokumen	33,520,000.00	1 Dokumen	133,080,000.00	Sekretariat	Kasongan
			Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	32,520,000.00	2 Dokumen	33,520,000.00	2 Dokumen	33,520,000.00	2 Dokumen	33,520,000.00	2 Dokumen	133,080,000.00	Sekretariat	Kasongan
			Penyusunan LKPj dan LPPD	Jumlah Dokumen LKPj dan LPPD	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	65,040,000.00	2 Dokumen	65,040,000.00	2 Dokumen	65,040,000.00	2 Dokumen	65,040,000.00	2 Dokumen	260,160,000.00	Sekretariat	Kasongan
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	65,040,000.00	1 Dokumen	65,040,000.00	1 Dokumen	65,040,000.00	1 Dokumen	65,040,000.00	1 Dokumen	260,160,000.00	Sekretariat	Kasongan
			Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	65,040,000.00	1 Dokumen	65,040,000.00	1 Dokumen	65,040,000.00	1 Dokumen	65,040,000.00	1 Dokumen	260,160,000.00	Sekretariat	Kasongan
						10,546,309,503.25		21,908,379,456.96		14,062,833,610.89		12,737,162,440.10		13,660,746,819.13		14,869,269,408.17		77,238,391,735.26		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan merupakan suatu komitmen yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Peningkatan Nilai Lakip	B	B	B	B	A	A	A
2	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	C	CC	CC	B	BB	A
3	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	n/a	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan BMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	n/a	100	100	100	100	100	100
5	Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	n/a	6	7	8	9	10	10
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	72	73	74	75	76	76

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, seluruh aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

**Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan,**

Drs. ROBY, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670308 199203 1 009